

Catatan Atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

VISI

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong adalah mendukung visi Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yaitu : “Menjadi Politeknik unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan dalam Tata Kelola Tridharma di Kawasan Indonesia Timur (2020-2024)”.

Visi tersebut akan mampu mendukung visi BRSDM-KP, karena Politeknik KP Sorong akan menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul di Kawasan Timur Indonesia, yaitu unggul dalam bidang iptek kelautan dan perikanan dalam tata kelola tridharma PT. Melalui keunggulan tersebut, Politeknik KP Sorong akan menghasilkan SDM yang handal dalam mengelola sumberdaya kelautan perikanan, sehingga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan /kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

MISI

Bahwa visi merupakan cita-cita dan sekaligus tantangan yang ingin diwujudkan oleh segenap sivitas akademika. Visi sebagai cita-cita adalah bersifat abstrak, sehingga perlu dilakukan aksi agar menjadi lebih nyata. Untuk itu diperlukan misi, sebagai instrumen untuk mewujudkan visi. Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, sesungguhnya, terkait dengan misi Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, yaitu misi kesatu : “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM-KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”. Keterkaitan itu adalah, bahwa misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, akan menindaklanjuti misi

Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan misi Politeknik KP Sorong, yaitu :

- Misi kesatu : Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi berbasis kompetensi;
- Misi kedua : Melaksanakan penelitian terapan dan murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang inovatif dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, taruna, dan masyarakat;
- Misi ketiga : Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- Misi keempat : Mengembangkan organisasi Politeknik KP Sorong dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dengan mendirikan program-program Diploma I, Diploma IV, dan Pasca Sarjana Sains Terapan (Magister Sains Terapan);
- Misi kelima : Menjalin dan meningkatkan jejaring kerjasama dengan organisasi/lembaga lain dalam aspek riset, pendidikan, dan pelatihan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, baik organisasi/lembaga nasional maupun internasional;
- Misi keenam : Meningkatkan eksistensi sarana dan prasarana perkantoran/ pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan, guna mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Misi ketujuh : Melaksanakan pembinaan Taruna dengan pembinaan berbasis karakter;
- Misi kedelapan : Melaksanakan tata kelola organisasi yang akuntabel;

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan- LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi pendapatan sumber

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4)Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5)Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- b) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0,1
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0,5
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	1

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.
- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (*dua belas*) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset
Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a

. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b

. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	255.074.000	255.074.000
Jumlah Pendapatan	255.074.000	255.074.000
Belanja Negara		
Belanja Pemerintah Pusat	21.774.327.000	21.774.327.000
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0
Jumlah Belanja	21.774.327.000	21.774.327.000

Sampai dengan semester II 2025 telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 8 kali dimana revisi dilakukan untuk keperluan dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tanggal DIPA	Total Pagu	Keterangan Revisi
1.	Dipa Petikan awal	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Revisi untuk BSTF
2.	Dipa Petikan revisi 1	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Revisi Untuk MPAK
3.	Dipa Petikan revisi 2	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	- Belanja listrik - Dokumen Tanah - Jasa Profesi Tanah - Pemeliharaan Kapal
4.	Dipa Petikan revisi 3	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Pergeseran belanja 51 Antar satker dalam satu kanwil
5.	Dipa Petikan revisi 4	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Pergeseran belanja 51 untuk memenuhi operasional dan pagu minus
6.	Dipa Petikan revisi 5	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Perubahan Anggaran pada peserta pendidikan vokasi untuk memenuhi kegiatan pembelajaran berupa : Praktik terpadu, pengembangan SDM
7.	Dipa Petikan revisi 6	02 Desember 2025	Rp. 21.774.327.000,-	Perubahan Anggaran pada peserta pendidikan vokasi untuk memenuhi kegiatan pembelajaran berupa : Operasional Pengajaran dan Praktik Teaching Factory

B.1 Pendapatan Negara Dan Hibah

Realisasi
Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 148.091.532,-

Negara
Hibah
148.091.532,-

Dan atau mencapai 58.06% persen dari estimasi pendapatan yang Rp. ditetapkan sebesar Rp. 255.074.000. Pendapatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian**Estimasi dan Realisasi Pendapatan**

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	255.074.000	148.091.532,-	58.06%
Pendapatan Hibah	0		0,00%
Jumlah	255.074.000	148.091.532,-	58.06%

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp
148.091.532,-

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 148.091.532,- dan Rp. 918.583.673,-.

B.1.1 Pendapatan

Perbandingan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ turun	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	2.848.000,-	153.184.000	(13.949.000)	-9,11%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.278.000,-	42.643.043	8.691.201	20,38%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	128.165.532,-	26.550.000	82.210.000	309,64 %
Pendapatan Biaya Pendidikan	10.800.000,-	22.000.000	(9.400.000)	-42,73%
Jumlah Belanja	148.091.532,-	918.583.673	463.661.790	184,14 %

B.1.2 Pendapatan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Hibah Rp0

Realisasi Pendapatan Hibah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Pendapatan Hibah adalah .

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2025 Tidak ada perubahan dari TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ turun	%
-	-	-	-	0,00%
-	-	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	0	0	0	0,00%

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja
Negara Rp.
21.395.082.335,-

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 21.395.082.335,- atau 98.26% dari anggaran belanja sebesar Rp. 21.774.327.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Rincian

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

U R A I A N	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pemerintah Pusat	21.774.327.000	21.395.082.335	98.26%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	
Total Belanja Kotor	21.774.327.000	21.395.082.335	98.26%
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah	21.774.327.000	21.395.082.335	98.26%

Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat
Rp21.395.082.335,-

B.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.395.082.335 dan Rp. 26.235.364.477,- Belanja Pemerintah Pusat adalah :

Perbandingan Belanja Pemerintah Pusat Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ turun	%
Belanja Pegawai	13.846.727.479,-	13.431.667.110	459.376.057	3.43%
Belanja Barang	7.548.354.856,-	12.383.472.841	(9.179.760.117))	20.66%
Belanja Modal	-	420.224.526	-	0,00%
Jumlah	21.395.082.335	26.235.364.477	903.076.418	5,72%

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp.13.846.727.479,-

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.846.727.479,- dan Rp. 13.431.667.110,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami penurunan sebesar 3.436%% dari TA 2024. Hal ini disebabkan beberapa pegawai mengalami peningkatan grade pembayaran tukin disebabkan telah diangkat menjadi dosen.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ turun	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.572.883.180	4.414.586.700	158.296.480	28,46%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.427	63.773	6.548	14,61%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	401.080.000	390.562.210	10.517.790	29,35%
Belanja Tunj. Anak PNS	131.056.326	129.804.040	25.063.694	33,15%
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.620.000	7.560.000	-	0,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	354.690.000	360.661.000	20.540.000	7,72%
Belanja Tunj. PPh PNS	48.882.728	50.333.131	35.704.892	279,99%
Belanja Tunj. Beras PNS	287.941.920	285.479.640	36.789.360	19,88%
Belanja Uang Makan PNS	620.810.000	562.281.000	86.435.000	27,78%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	481.290.000	461.150.000	45.525.000	15,47%
Belanja Tunjangan Umum PNS	111.535.000	103.855.000	16.355.000	25,72%
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	650.566.100	630.143.900	55.108.400	13,33%
Belanja Gaji Pokok PPPK	158.694.000	54.216.800	36.029.600	0,00%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.480	421	173	0,00%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.963.100	2.562.880	1.601.800	0,00%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.210.076	1.025.152	640.720	0,00%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.760.000	7.320.000	4.800.000	0,00%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.631.860	3.041.460	1.955.340	0,00%
Belanja Uang Makan PPPK	26.712.000	12.888.000	8.352.000	0,00%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	18.450.000	6.900.000	4.575.000	0,00%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.890.000	0	4.575.000	0,00%

Belanja Uang Lembur	189.012.000	191.024.000	(31.106.000)	- 26,00%
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.602.591.950,-	5.686.103.652	848.402.183	26,15%
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	206.409.882	90.612.997	32.997.475	0,00%
	-	-	-	0,00%
Jumlah Belanja kotor	13.900.740.379	7.896.594.346	2.058.420.495	26,07%
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	1.404	1.404	0,00%
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	-	555.000	555.000	0,00%
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	-	1.480.000	0	0,00%
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	54.012.900	18.272.422	10.340.642	0,00%
Jumlah Belanja	13.846.727.479	13.431.667.110	2.048.078.449	25,94 %

Realisasi Belanja
Barang Rp.
7.548.354.856,-

B.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.548.354.856,- dan Rp. 12.383.472.841,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar -21,194% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara disebabkan perbaikan akselerasi pengadaan sejak awal tahun yang berdampak meningkatnya serapan anggaran terutama belanja barang

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik/ turun	%
Belanja Keperluan Perkantoran	1.018.527.950	1.595.012.246	216.556.897	26,09%
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	2.194.167.247	367.949.937	20,15%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.348.200	(114.600)	- 10,01%
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	94.690.000	111.430.400	(7.517.600)	-8,73%
Belanja Barang Operasional Lainnya	69.289.690	49.488.790	(23.702.422)	- 42,33%
Belanja Bahan	98.555.578	194.424.685	(33.689.275)	- 17,68%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.219.235.400	3.690.663.925	(83.486.998)	-6,98%
Belanja Peralatan dan Mesin -Extrakomptabel	11.460.000	1.835.601	-	-
Belanja Barang Persediaan Lainnya	190.047.157	471.998.316	(48.473.349)	- 17,85%
Belanja Langganan Listrik	112.769.730	319.205.266	83.963.885	54,33%
Belanja Langganan Telepon	-	14.079.936	-	0,00%
Belanja Langganan Air	-	50.579.047	50.579.047	0,00%
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	183.191.1651	174.663.376	11.305.588	9,77%

Belanja Jasa Profesi	132.000.000	294.490.000	(150.706.451)	- 42,97%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.486.500	1.650.398.647	(1.187.105.398)	- 82,51%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	264.032.200	684.583.188	(304.791.953)	- 59,67%
Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.120.000	17.152.710	(30.275.540)	- 78,02%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	846.460.994	(166.847.263)	- 20,90%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000	25.155.000	(9.450.000)	- 64,95%
Pengembalian Belanja Bahan	-	207.125	(207.125)	100,00%
Belanja HonorOutput Kegiatan	-	11.050.518	(11.050.518)	-100,00 %
Belanja Jasa Lainnya	-	6.660.000	(6.660.000)	-100,00 %
Jumlah Kotor	6,908,646,771,-	12.383.472.841	(1.872.204.024)	-16,74 %
Pengembalian Belanja	-	207.025		0,00%
Jumlah Belanja	6,908,646,771,-	12.383.265.816	(1.322.276.077)	- 21.194 %

B.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Rp. 0

Realisasi Belanja Modal per tanggal Desember 2005 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar % dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak adanya lagi pagu anggaran untuk belanja modal, adapun belanja modal pada tahun lalu adalah berupa pembangunan laboratorium terpadu.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi T.A. 2025	Realisasi T.A. 2024	Naik/turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 0,-	-	-	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	Rp. 0,-	0	-	0,00%
Pengembalian Belanja		-	-	0,00%
Jumlah Belanja	Rp. 0,-	0	-	0,00%

B.3 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pada tahun ini tidak terdapat belanja Modal dan belanja perjalanan dinas dikarenakan adanya efesiensi anggaran.
pendaftaran akun operator sehat.

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

C.1 ASET LANCAR

*Aset Lancar Rp.
130.578.771,-*

Jumlah Aset Lancar Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 130.578.771,- dan Rp. 118.609.360,00. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.67.600.000,-*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 67.600.000,- dan Rp. 0,00. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Tunai	67.600.000	
Bank BNI BPG Politeknik KP sorong	0	0
Kuitansi UP belum di SPJ-kan	0	0
Jumlah	67.600.000	0

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Nilai sejumlah Rp. 67.600.000,- pada kas dibendahara pengeluaran merupakan sisa dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) per tanggal 31 Desember 2025 yang sudah disetorkan kembali ke negara diakibatkan adanya sisa belanja pada Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan penjelasan rincian pada Akun 523111 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 67.300.000,- dan 521219 pendampingan PTUN sebesar Rp. 600.000,- dan sudah dilakukan penyetoran pada tanggal 07 Januari 2026 dengan Kode Billing 702601074230517 sebesar Rp. 67.300.000,- dengan Kode Billing dan Penyetoran tanggal 08 Januari 2026 kode billing 702601084238254 untuk nilai Rp. 300.000,-.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Tunai	0	0
Bank BNI BPG Politeknik KP sorong	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

berupa pendaftaran calon taruna baru untuk komponen pendaftaran dan tes yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0.00 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada

bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas lainnya di bendahara penerimaan	0	0
kas lainnya dari hibah	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang
Bukan Pajak
Rp.
8.400.000,-*

Piutang Bukan Pajak per Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.400.000,- dan Rp. 78.962.226,- dengan penjelasan adanya pengembalian belanja pegawai Tugas Belajar yang masih harus diterima dan dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Pengembalian belanja pegawai yang harus diterima	8.400.000	79.286.291
Tarik sewa rumah dinas	0	0
Jumlah	8.400.000	79.286.291

C.1.5 Bagian lancar TP/TGR

Bagian
lancar TP/T
GR Rp
8.400.000,-

Bagian lancar TP/TGR per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.400.000,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR pengembalian belanja tunjangan pegawai Tugas Belajar yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian lancar TP/TGR Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 20
TP/TGR	8.400.000,00	0
		0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Bagian lancar TP/TGR adalah pengembalian tunjangan belanja pegawai Tugas Belajar an. Sigit Deddy Purnomo.

C.1.6 Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Bagian Lancar tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran :

C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar -Rp.324.065,- dan -Rp. 42.000,- merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek adanya piutang lainnya dari belanja pegawai berupa tunjangan fungsional pegawai Tugas Belajar Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Piutang Lainnya Semester II TA 2025.

Kualitas Piutang	Nilai piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang bukan Pajak			
lancar	0	0,0%	-42.000,-
Kurang Lancar	0	0,0%	0
Diragukan	0	0,0%	0
Macet	0	0,0%	0
Jumlah	0	0%	-42.000,-
Bagian Lancar TP/TGR	0	50%	0
lancar	0	0,0%	-42.000,-
Kurang Lancar	0	0,0%	0
Diragukan	0	0,0%	0
Macet	0	0,0%	0
Jumlah	0	0%	-42.000,-
Bagian lancar TPA	0	0%	0
lancar	0	0,0%	0
Kurang Lancar	0	0,0%	0
Diragukan	0	0,0%	0
Macet	0	0,0%	0
Jumlah	0	0%	0
Jumlah penyisihan piutang tak tertagih	0	0%	-42.000,-

C.1.8 Beban dibayar Dimuka

*Beban
Dimuka Rp0*

Saldo Beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Beban Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar Dimuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban dibayar Dimuka Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Beban dibayar Dimuka : -

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp. 0,00. dan Rp. 0,00. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Pendapatan jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan jasa Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.1.10 Persediaan

Persediaan Rp.

54,620,771

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 54,620,771,- dan

Rp. 39.646.334 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024

Jenis	Realisasi T.A.2025	Realisasi T.A. 2024
Barang Konsumsi	32,780,980	9.241.922
Bahan untuk Pemeliharaan	254,634	88.800
Suku Cadang	90.000,-	90.000
Bahan Baku	19,220,583	20.939.040
Persediaan Lainnya	2,364,574,-	9.287.372
Jumlah	54,620,771	39.646.334

Persediaan tersebut di atas dalam barang dalam keadaan baik.

C.2 ASET TETAP

Aset Tetap

Rp95.800.439.117,-

-

Saldo Aset Tetap Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 95,800,439,117,- dan Rp. 94.321.779.600,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

C.2.1 Tanah

Tanah

Rp31.346.100.000

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 31.346.100.000,00 dan Rp. 27.638.100.000,00. Nilai Tanah tersebut terdapat Mutasi . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	27.638.100.000
Mutasi tambah :	
Perolehan Lainnya	3.708.000.000
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2025	31.346.100.000

Penjelasan atas penambahan mutasi tambah berupa penambahan tanah Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester II TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	139.316 M2	Jl. Kapitan Pattimura Politeknik KP Sorong	31.346.100.000
Jumlah			31.346.100.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Dalam hal penguasaan tanah, terdapat penambahan tanah sesuai putusan MA no. 4230K/PDT/2023 tanggal 19 Februari 2024 dengan no sertifikat NIB. 33.03.000001379 seluas 16.480 M2 dengan nilai taksiran Rp. 3.708.000.000.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp38.506.776.008*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 38.506.776.008 dan Rp. 38.506.556. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	38.506.776.008
Mutasi tambah:	0
Pembelian	
Transfer Masuk	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Mutasi Kurang:	0
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	38.506.776.008,-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(37.832.962.559,-)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	673.813.449,-

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa rincian akan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp77.644.621.323*

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.644.621.323,00 dan Rp. 77.644.621.323,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	77.644.621.323
Mutasi tambah:	
Penyelesaian dengan KDP	
Transfer Masuk	
Perolehan lainnya	
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	
Saldoper 31 Desember 2025	77.644.621.323
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(15.183.076.839)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	62.461.544.484,-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa: -

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 3.547.690.920,00 dan Rp. 3.547.690.920,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.547.690.920*

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	3.547.690.920
Mutasi tambah:	
Penyelesaian dengan KDP	
Transfer Masuk	

Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	
Saldo per 31 Desember 2025	3.547.690.920,-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	2.855.979.254,-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	691.711.666,-

*Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa: -
Tidak terdapat perubahan mutasi jalan, irigasi dan jaringan*

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya Rp.
1.128.619.743,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah

Rp. 1.128.619.743,00 dan Rp. 1.128.619.743,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	1.128.619.743
Mutasi tambah:	
Penyelesaian dengan KDP	
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Saldo per 30 Juni 2025	1.128.619.743
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	689.092.000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	439.527.743

Tidak ada Mutasi tambah/kurang:

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.
181.912.400

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 181.912.400,00 dan Rp. 181.912.400,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi penyelesaian KDP dalam rangka penyelesaian pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 desember 2024	181.912.400
Mutasi tambah:	
Pengembangan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Saldo per 31 Desember 2025	181.912.400

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang, untuk selanjutnya akan dilaksanakan penghapusan KDP dengan surat usulan nomor: B.118/POLTEK.SRG/PL710/I/2024 tanggal 18 januari 2025 dan Surat Hasil Reviu dari Inspektorat Jenderal Nomor : T.329/ITJ.3/HP.380/V/2025 28 Mei 2025 perihal Hasil Reviu Atas Usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Politeknik KP Sorong tanggal 28 Mei 2025.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp-
56.561.110.652,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. -56.561.110.652,- dan Rp. -54.325.940.794,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang selama masa manfaat aset yang bersangkutan Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	37.832.962.559,-	-37.523.932.062	982.843.946
2	Gedung dan Bangunan	15.183.076.839,-	-13.290.362.498	64.354.258.825
3	Jalan,Irigasidan Jaringan	2.855.979.254,-	-2.822.554.234	725.136.686
4	Aset Tetap Lainnya	689.092.000	-689.092.000	439.527.743
Akumulasi Penyusutan		56.561.110.652,-	-54.325.940.794	67.411.369.313

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0

Piutang Jangka Panjang Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0,00. dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2023
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasan tentang Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi : Tidak ada

C.3.2 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

*Piutang Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0*

Saldo Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp. 0,00. dan Rp. 0,00. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran untuk masing- masing debitur adalah sebagai berikut

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Penjelasantentang Piutang Tagihan Penjualan Angsuran :

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-Piutang
Jangka Panjang
Rp0*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember2025dan 2024masingmasingadalah sebesarRp.0,00. dan Rp. 0,00. Penyisihan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Semester II
TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang bukan Pajak			
lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Bagian Lancar TP/TGR	0	0%	0
lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Bagian lancar TPA	0	0%	0
lancar	0	0%	0
Kurang Lancar	0	0%	0
Diragukan	0	0%	0
Macet	0	0%	0
Jumlah	0	0%	0
Jumlah penyisihan piutang tak tertagih	0	0%	0

C.4 ASET LAINNYA

*Aset Lainnya Rp.
92.590.390,-*

Aset Lainnya Politeknik Kelautandan Perikanan Sorongper 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 92.590.390,- dan Rp. 709.613.913.

Aset Tak Berwujud Rp.
0

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp168.305.000,00 dan Rp.168.305.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak memiliki wujud fisik.

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	168.305.000
Mutasi tambah:	
-	
Saldo per 31 Desember 2025	168.305.000
Amortisasi s.d 31 Desember 2025	168.305.000
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Rincian Aset Tak Berwujud semester II TA 202

No	Uraian	TAHUN 2025
1	Software	168.305.000,-
2		0
Jumlah		0,-

C.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp.876.072.000
,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 876.072.000,- dan Rp. 876.072.000,-

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Lain-lain Semester I TA 2025 dan 2024

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	876.072.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset Tetap	

Mutasi Kurang:	0
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
Penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	876.072.000,-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	783.481.610,-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	92.590.390

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp-
783.481.610,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. - 783.481.610,00 dan 780.873.430,00 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Semester II TA 2025 dan 2024

No	Aset Lainnya	Nilai perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak berwujud	168.305.000	168.305.000,-	
1	Software	168.305.000,-	168.305.000,-	0
B.	Aset Lain - lain	707.767.000,-	783.481.610,-	92.590.390,-
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	707.767.000,-	783.481.610,-	92.590.390,-
	Total	783.481.610	783.481.610	

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp.141.888.188,-*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca Kewajiban Jangka Pendek Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 141.888.188 dan Rp. 718.644.051

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka Dari
Kppn Rp.
67.600.000,-*

Uang Muka dari KPPN pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.67.600.000,- dan Rp. 0,00.

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan(TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp.74.288.188,-*

Utang kepada Pihak Ketiga pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.74.288.188,- dan Rp.718.644.051.

Adapun rincian utang kepada Pihak Ketiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Beban barang yang masih harus dibayar	21.617.480,-
2	Beban pegawai yang masih harus dibayar	52.680.708,-
Jumlah		74.288.188,-

*Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp. 0,00,-*

C.5.3 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0
2	-	0
3	-	0
Jumlah		-

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. seperti pada lampiran Rincian BAST/SPBy yang belum SPP

*Beban Yang
Masih Harus
Dibayar Rp.
0,00*

C.5.4 Beban yang Masih harus dibayar

Beban yang Masih harus dibayar pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing- masing 0,00 dan Rp. 0,00 merupakan kewajiban pemerintah kepada Pihak Ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban yang Masih harus dibayar TA 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	-	-	0
2			0
3			0
Jumlah			0

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

C.6 Ekuitas

Ekuitas
Rp. 95.875.890.715,-

Ekuitas pada Politeknik Kelautandan Perikanan Sorong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 95.875.890,- dan Rp. 94.431.358.822,-

C. 7 Pengungkapan lainnya

Pada to do list tidak terdapat perbaikan sehingga sudah dapat dilakukan tutup buku sementara periode Desember 2025:				